

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2023 (LKjIP)



***Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Pati***

Jl. Panglima Sudirman No. 12 Kode Pos 59113
Telepon : 0295 – 381932 [http : //dkp.patikab.go.id](http://dkp.patikab.go.id)

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati merupakan perwujudan pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 Tentang SAKIP dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati secara garis besar meliputi: Profil Instansi, Perencanaan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja (Uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisa akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan).

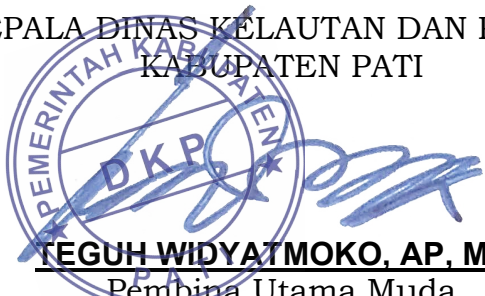
Tujuan LKjIP secara umum adalah untuk melaporkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sekaligus juga melaporkan kinerja instansi yang menjadi tolok ukur tanggungjawab suatu instansi.

Dengan LKjIP tersebut akan diketahui perkembangan dari tahun ke tahun tentang pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Diharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk menyempurnakan LKjIP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati di masa yang akan datang.

Pati, 2024

Plt. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PATI



TEGUH WIDYATMOKO, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197605281994121002

D A F T A R I S I

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Data Umum Organisasi	2
1.3 Struktur Organisasi	3
1.4 Tantangan dan Peluang	14
1.5 Sistematika Penyajian LKjIP	16
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 17
2.1 Rencana Strategis (Renstra)	17
2.2 Perjanjian Kinerja	18
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 21
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	21
3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja	28
3.3. Hambatan dan Rencana Aksi	33
3.4. Realisasi Anggaran	35
 BAB IV P E N U T U P	 38

LAMPIRAN :

- Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan 2023

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 1.1 Aset Bergerak Dinas Kelautan dan Perikanan	11
Tabel 1.2 Aset Tidak Bergerak Dinas Kelautan dan Perikanan	12
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023	19
Tabel 2.2 Anggaran dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023	20
Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026	23
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Tujuan 1 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2023	24
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Tujuan 2 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2023	25
Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2023	27
Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2023	27
Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2023	28
Tabel 3.7 Data Series Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2020 s.d 2023	29
Tabel 3.8 Perbandingan Hasil Realisasi Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2021, 2022 dan Tahun 2023	29
Tabel 3.9 Realisasi APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2023	36

IKHTISAR EKSEKUTIF

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi dan entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) perlu disusun untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Bupati atas kinerja yang telah dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati untuk meningkatkan kinerjanya.

Menghadapi kondisi masyarakat yang semakin kritis ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati kedepan tentunya menghadapi berbagai tantangan yang semakin berat. Hal ini karena Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Itulah sebabnya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati menetapkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pati Tahun 2023 - 2026 sebagai berikut :

1. Tujuan jangka menengah yang hendak dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati adalah:

- a. *Meningkatnya Produksi Perikanan*

Tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan ini mempunyai indikator pertumbuhan produksi perikanan baik itu perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.

b. Meningkatnya Konsumsi Makan Ikan

Tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan ini mempunyai indikator Pertumbuhan Angka Konsumsi Makan Ikan

2. Sasaran jangka menengah yang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati adalah:

- a. *Meningkatnya produksi perikanan tangkap* dengan indikator pertumbuhan produksi perikanan tangkap.
- b. *Meningkatnya produksi perikanan budidaya* dengan indikator pertumbuhan produksi perikanan budidaya.
- c. *Meningkatnya produksi hasil olahan ikan* dengan indikator pertumbuhan produksi hasil olahan ikan

Secara global hasil pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2023 ditinjau dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan hasil analisis capaian kinerja, maka pada Tahun 2023 ini Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pati menunjukkan capaian kualitatif sebesar 1.357%. Hasil ini telah mencapai target sasaran tahun yang telah ditetapkan pada Renstra, meskipun masih dijumpai adanya beberapa kendala dan kelemahan yang masih memerlukan peningkatan serta perbaikan di masa yang akan datang.

Secara keseluruhan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati pada Tahun Anggaran 2023 telah mengalokasikan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar Rp. 5.193.561.000,00 (lima milyar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 5.135.660.220,00 (lima milyar seratus tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah) atau sebesar 98,89%.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan baik dari anggaran APBD maupun APBN. Capaian kinerja ini sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 Tentang SAKIP dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah kepada masyarakat, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam hal ini, setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada para stakeholders. Tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberikan mandat/ amanah. Dengan demikian LKjIP merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima instansi pemerintah tersebut. Selain itu penyampaian LKjIP kepada pihak yang berhak (secara hirarki) juga bertujuan untuk memenuhi antara lain:

- a. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. LKjIP ini lebih menonjolkan akuntabilitas manajerialnya;
- b. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan dalam mencapai kehematan,

- efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan misi instansi;
- c. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

Setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), tujuan mengimplementasikan SAKIP tersebut adalah untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, instrumen dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap-tahap Penetapan perencanaan strategi, Pengukuran kinerja, Pelaporan kinerja dan Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

1.2 Data Umum Organisasi

1.2.1 Dasar Hukum

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan, dijabarkan tugas, pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

b. Fungsi

Dinas dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
2. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
4. pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

1.3 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perikanan Tangkap;
- d. Bidang Perikanan Budidaya;
- e. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan;
- f. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan;
- g. UPTD.

Berdasarkan Susunan Struktur Organisasi yang telah disebutkan sebelumnya masing-masing unsur dalam Organisasi mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai pelaksanaan tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan dan program, keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan Dinas.

Sekretariat dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan Subbagian Perencanaan dan Program, Subbagian Keuangan, dan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pengelolaan dan pelayanan perencanaan dan program, keuangan dan administrasi umum dan kepegawaian serta hukum, hubungan masyarakat, dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;

- c. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Dinas; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- a. menyusun pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan dari masing-masing bidang untuk mengetahui mutu pelaksanaan kegiatan;
- b. menyusun rencana strategis Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya guna pedoman pelaksanaan tugas;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja anggaran murni dan perubahan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran guna terwujudnya tertib administrasi keuangan;
- d. menyusun laporan perkembangan kinerja program dan kegiatan, laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan demi terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

C. Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan sarana prasarana, pengembangan usaha, pemberdayaan kenelayanan, pengawasan, perlindungan kenelayanan dan sumber daya ikan.

Bidang Perikanan Tangkap dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, serta pembinaan dan pelaksanaan kegiatan sarana prasarana, pengembangan usaha, pemberdayaan kenelayanan, pengawasan, perlindungan kenelayanan dan sumber daya ikan;

- b. pengelolaan dan penyelenggaraan sarana prasarana, pengembangan usaha, pemberdayaan kenelayanan, pengawasan, perlindungan kenelayanan dan sumber daya ikan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan sarana prasarana, pengembangan usaha, pemberdayaan kenelayanan, pengawasan, perlindungan kenelayanan dan sumber daya ikan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan serta pengelolaan kegiatan produksi dan pengembangan usaha pembudidaya ikan, pengelolaan kesehatan dan lingkungan pembudidayaan ikan, pengembangan sarana dan prasarana pembudidaya ikan.

Bidang Perikanan Budidaya dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, serta pembinaan dan pelaksanaan kegiatan produksi dan pengembangan usaha pembudidaya ikan, pengelolaan kesehatan dan lingkungan pembudidayaan ikan, pengembangan sarana dan prasarana pembudi daya ikan;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan produksi dan pengembangan usaha pembudidaya ikan, pengelolaan kesehatan dan lingkungan pembudidayaan ikan, pengembangan sarana dan prasarana pembudidaya ikan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan produksi dan pengembangan usaha pembudidaya ikan,

pengelolaan kesehatan dan lingkungan pembudidayaan ikan, pengembangan sarana dan prasarana pembudidaya ikan; dan

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan

Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan pengelolaan ekosistem pesisir dan laut dan bina mutu dan diversifikasi produk kelautan perikanan.

Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan ekosistem laut dan pesisir, bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan pengelolaan ekosistem laut dan pesisir, bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengelolaan ekosistem laut dan pesisir, bina mutu dan diversifikasi produk kelautan perikanan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan

Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, serta pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan pengembangan sarana prasarana Tempat Pelelangan Ikan.

Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan pengembangan sarana prasarana Tempat Pelelangan Ikan;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan pengembangan sarana prasarana Tempat Pelelangan Ikan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan pengembangan sarana prasarana Tempat Pelelangan Ikan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. Kelompok jabatan fungsional

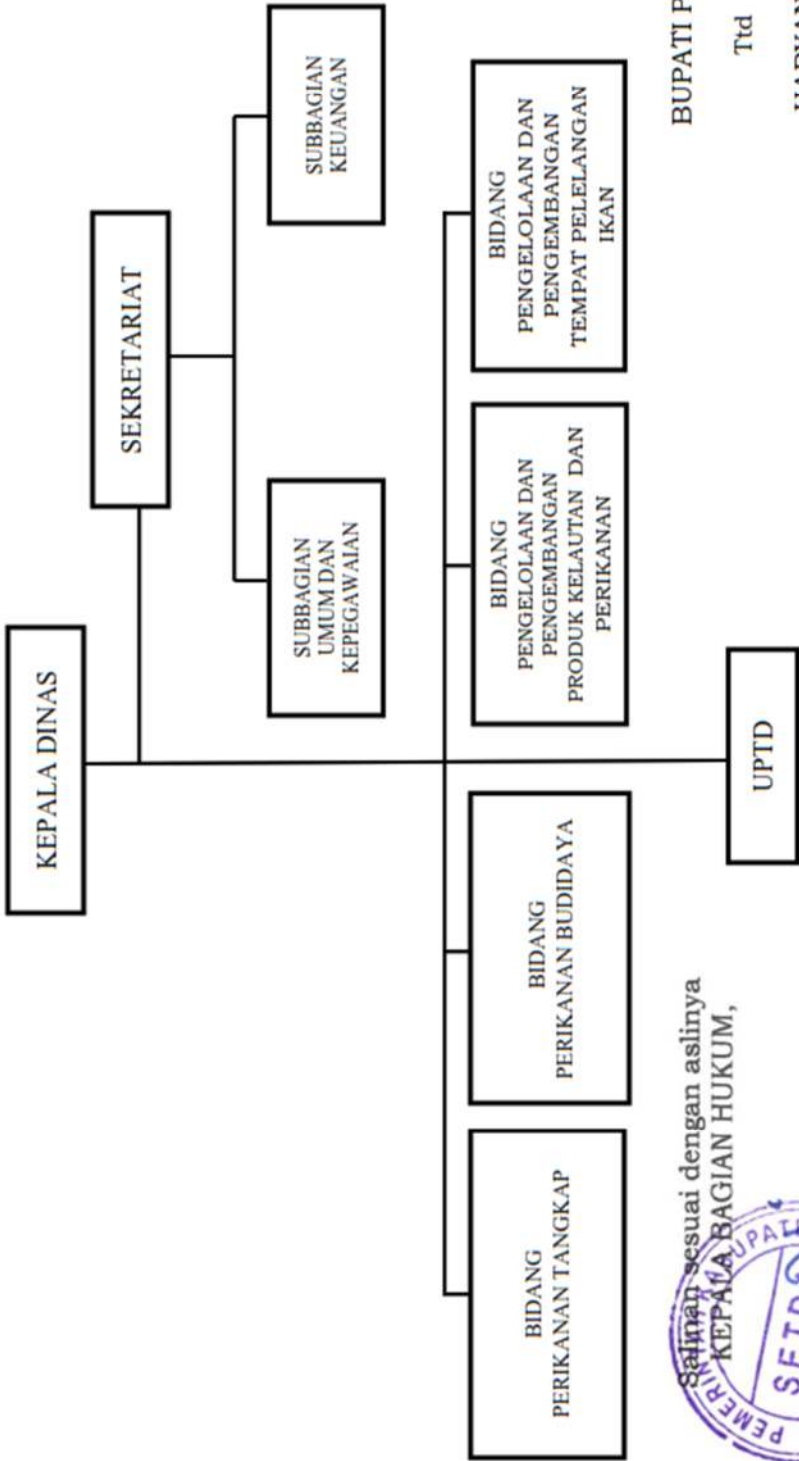
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. UPTD

Adapun bagan susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dapat dilihat di bawah ini :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 59 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUPATI PATI,
Ttd
HARYANTO

Guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan kelautan dan perikanan, maka Dinas Kelautan dan Perikanan didukung oleh potensi sumber daya manusia (SDM) sebanyak 45 orang personel (data sampai Desember 2023), terdiri atas 29 orang laki-laki dan 16 perempuan. Secara rinci jumlah pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut berikut :

Jumlah PNS : 45 orang, terdiri dari :

1. Pejabat Struktural : 8 orang
2. Fungsional Umum/ Staf : 37 orang

Jumlah PNS menurut golongan

1. Golongan I : - orang
2. Golongan II : 16 orang
3. Golongan III : 24 orang
4. Golongan IV : 5 orang

Jumlah PNS menurut tingkat pendidikan

1. SD : 0 orang
2. SLTP : 0 orang
3. SLTA : 18 orang
4. Sarjana Muda : 1 orang
5. Sarjana : 18 orang
6. Pasca Sarjana : 8 orang

Tenaga harian lepas berjumlah 142 orang terdiri dari 30 orang tenaga harian lepas kantor, 100 tenaga harian lepas TPI dan 7 orang tenaga harian lepas BBI dan Tambak Dinas. Selain itu juga didukung adanya jabatan fungsional yaitu Penyuluh Perikanan sebanyak 15 orang dan 12 orang Penyuluh Perikanan Bantu yang merupakan pegawai pusat. Selain itu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati ditunjang dengan kelengkapan prasarana yang meliputi: Gedung Kantor 1 unit, Balai Benih Ikan (BBI) 3 unit, TPI/PPI 8 unit, Pos Pelayanan Ikan Terpadu 1 unit, dan Tempat Penanganan Hasil Ikan 1 unit.

Disamping sumber daya manusia, sejumlah aset pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kedinasan meliputi aset

bergerak berupa kendaraan (roda empat dan roda dua), peralatan kantor (komputer, printer, LCD projector, lemari arsip, meja-kursi kantor, dll) dan aset tidak bergerak meliputi tanah, gedung perkantoran/bangunan. Deskripsi lengkap aset/modal fisik Dinas Kelautan sebagaimana tabel 1.1 dan tabel 1.2 berikut ini.

<div>Tabel 1.1</div> <div>Aset Bergerak Dinas Kelautan dan Perikanan</div>			
No	Nama Aset	Jumlah	Kondisi
1	Mobil dinas	10	Baik
2	Sepeda motor dinas	65	Baik
3	Traktor	4	Baik
4	Genset	9	Baik
5	Pompa Air	13	Baik
6	Excavator/ Bego	2	Baik
7	Truck tangki air	1	Baik
8	Alat2 laboratorium	39	Baik
9	Mesin ketik manual	4	Baik
10	Almari	90	Baik
11	Meja	219	Baik
12	Kursi	738	Baik
13	Filling kabinet	31	Baik
14	Tabung pemadam	7	Baik
15	Timbangan	12	Baik
16	Lemari es	5	Baik
17	Freezer	1	Baik
18	Komputer/ PC	37	Baik
19	Laptop	67	Baik
20	Printer	72	Baik
21	AC	35	Baik
22	LCD proyektor	9	Baik
23	Kamera digital	8	Baik
24	Handycam	3	Baik
25	Wireless	3	Baik
26	Sound system	9	Baik
27	Televisi	4	Baik
28	Mesin finger print	12	Baik
29	Mesin potong rumput	2	Baik
30	Rak Arsip	8	Baik
31	CCTV	30	Baik
32	Hand phone	4	Baik

No	Nama Aset	Jumlah	Kondisi
33	TV	9	Baik
34	Pompa Pemadam	1	Baik
35	Thermometer	15	Baik
36	Penghancur Kertas	2	Baik
37	Sorong	1	Baik
38	Brankas	1	Baik
39	Faximile	1	Baik

Tabel 1.2
Aset Tidak Bergerak Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Nama Tanah/ Bangunan	Luas Tanah (m ²)	Luas Bangunan (m ²)	Ket
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.479	817	
2	TPI Juwana Unit I	6.463	2.325	
3	TPI Juwana Unit II	40.000	3.680	
4	TPI Banyutowo	2.351	2.351	
5	TPI Puncel	420	214	
6	TPI Sambiroto	506	132	
7	TPI Margomulyo	271	84	
8	TPI Pecangaan	300	275	
9	TPI Alasdowo	120	72	
10	BBI Brati	14.180	639	
11	BBI Sukolilo	11.000	107,75	
12	BBI Tlogowungu	19.789	178	
13	Tambak Dinas Margomulyo	4.500	36	Bangunan gudang
14	Tambak Dinas Dororejo	4.100	81	Bangunan Handling splis
15	Laboratorium POSIKANDU	-	54	Berada di lahan tambak dinas Dororejo

Potensi Bidang Kelautan dan Perikanan

- Luas Wilayah Kawasan Pesisir : 37.943 Ha
- Jumlah Kecamatan Kawasan Pesisir : 7 kec.

- Jumlah Desa Kawasan Pesisir : 136 desa
- Panjang Pantai : 60 km
- Luas Tambak Garam : 2.901.62 Ha
- Luas Potensi Mangrove : 8.906.352 Ha
- Luas Eksisting Mangrove : 225,125 Ha
- Terumbu Karang Buatan
 - Muara Sungai Juwana : 450 m²
 - Pantai Desa Lengkong : 450 m²
 - Muara Sungai Juwana : 450 m²
- Rumpon Pantai Banyutowo : 4.400 m²
- Kelompok Pembudidaya Garam
 - Jumlah Kelompok PUGAR : 928 kelompok
 - Jumlah Kecamatan : 4 kec.
 - Jumlah Desa : 21 desa
- Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB)
 - Berbadan Hukum : 135 KUB
 - KUB BH Kemenkumham : 32 KUB
 - KUB BH Notaris : 40 KUB
- Koperasi Nelayan Berbadan Hukum : 8

Peran seperti tersebut di atas secara umum telah dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dengan hasil yang baik karena keberhasilannya dalam penerapan manajemen instansi pemerintah dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi secara efisien. Strategi yang menyeluruh dengan memperhatikan seluruh faktor di lingkungan internal maupun eksternal dibutuhkan untuk pencapaian sasaran dan tujuan.

Sebagai proses penetapan keputusan untuk memilih alternatif yang terbaik, strategi merupakan perwujudan dari koordinasi dalam implemementasi kegiatan-kegiatan tersebut. Koordinasi dan komunikasi akan mencairkan kebekuan dan kebuntuan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang kompleks.

Implementasi koordinasi menjadi lebih sulit dengan adanya ego sektoral, prioritas alokasi sumberdaya dan lain-lain.

Keberhasilan sebuah organisasi akan banyak dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menyampaikan informasi secara terbuka, seimbang dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Dengan penguasaan informasi yang seimbang, pihak-pihak yang terkait dengan organisasi dapat mengambil keputusan yang wajar.

Penyampaian informasi secara tertulis, periodik dan melembaga mutlak diperlukan sebagai wujud pertanggung jawaban Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pati dalam mengungkapkan dan mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan latar belakang tersebut di atas, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pati melaksanakan kegiatan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023.

1.4 Tantangan dan Peluang

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan tugas dan fungsi utamanya kurun waktu lima tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD. Berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.

1. Tantangan

Berdasarkan profil perikanan didapatkan gambaran bahwa terdapat peluang pengembangan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati. Adapun tantangan dalam pelayanan adalah:

- a) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya manfaat mengkonsumsi ikan;
- b) Kurangnya nilai tambah produk pengolahan ikan;

- c) Degradasi lingkungan (mangrove, terumbu karang) dan penurunan mutu perairan;
- d) Keterbatasan sarana prasarana penangkapan dan budidaya ikan;
- e) Tingginya harga pakan ikan;
- f) Rendahnya harga garam rakyat dibanding garam industri;

2. Peluang

Beberapa peluang yang dapat diambil dalam upaya pengembangan sektor Kelautan dan Perikanan antara lain :

- a. Promosi GEMARIKAN;
- b. Berkembangnya industri perikanan;
- c. Dukungan permodalan dalam bentuk kredit lunak dan pola kemitraan;
- d. Berkembangnya Gerakan Cinta Lingkungan;
- e. Berkembangnya teknologi pergaraman;
- f. Pembangunan gudang garam dan koperasi garam.

Berdasarkan peluang dan tantangan pengembangan di Kabupaten Pati dapat dirumuskan dalam suatu isu strategis. Isu strategis merupakan permasalahan berisi gabungan masalah-masalah yang membawa kerugian dalam jangka waktu yang lama.

Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar ataupun sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Merujuk pada Tupoksi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dalam mengelola potensi kelautan dan perikanan yang besar serta amanah mengelolanya untuk kesejahteraan masyarakat, maka isu strategis yang dirumuskan adalah:

- 1. Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya
- 2. Peningkatan angka konsumsi makan ikan
- 3. Peningkatan nilai tambah produk pengolahan ikan

4. Peningkatan kualitas SDM Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan
5. Penerapan teknologi usaha Kelautan dan Perikanan

1.5 Sistematika Penyajian LKjIP

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2023 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati kepada publik atas pencapaian kinerja pada Tahun Anggaran 2023. Selain itu, LKjIP juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun-tahun mendatang.

Penyusunan LKjIP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 Tentang SAKIP dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan;
- Bab II : Perencanaan Kinerja;
- Bab III : Akuntabilitas Kinerja
- Lampiran-lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis (Renstra)

Perencanaan Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2023 – 2026 adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati selama kurun waktu satu sampai dengan empat tahun yaitu tahun 2023 – 2026, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Perencanaan Strategik (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 – 2026 ini dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijaksanaan operasional baik di jajaran struktural maupun fungsional/ staf dalam melaksanakan tugas sehari-hari, baik program, proyek dan kegiatan sesuai dengan peran, tugas pokok dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Di samping itu juga dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan pelaksanaan, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras, serasi dan seimbang, dengan demikian semua potensi yang ada dapat didayagunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan.

Rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati yang mencakup tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta strategi pencapaian program akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian program target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2023 berikut program dan kegiatan pendukung akan dijelaskan dalam perencanaan kinerja tahun 2023.

Dalam Perencanaan Kinerja Tahunan Perangkat Daerah terdapat tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, yaitu :

Tujuan :

1. Meningkatnya Produksi Perikanan

Tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan ini mempunyai indikator pertumbuhan produksi perikanan baik itu perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.

2. Meningkatnya Konsumsi Makan Ikan

Tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan ini mempunyai indikator Pertumbuhan Angka Konsumsi Makan Ikan.

Sasaran :

1. Meningkatnya produksi perikanan tangkap dengan indikator pertumbuhan produksi perikanan tangkap.

2. Meningkatnya produksi perikanan budidaya dengan indikator pertumbuhan produksi perikanan budidaya.

3. Meningkatnya produksi hasil olahan ikan dengan indikator pertumbuhan produksi hasil olahan ikan.

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perjanjian kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2023 mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Tahun 2023, Strategi dan Prioritas APBD Tahun 2023 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Pertumbuhan produksi perikanan tangkap	0,5%
2	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Pertumbuhan produksi perikanan budidaya	0,5%
3	Meningkatnya produksi hasil olahan ikan	Pertumbuhan produksi hasil olahan ikan	2,19%

Penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD tahun 2023 strategi dan prioritas APBD tahun 2023 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dengan jumlah anggaran yang digunakan sebesar Rp. 5.193.561.000,- (lima milyar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang dirinci dalam program sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Anggaran dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan
Tahun 2022

Nama Program	Jumlah Anggaran	
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp.	2.492.371.500,00
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp.	2.618.149.500,00
Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	Rp.	59.040.000,00
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp.	24.000.000,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi Bupati yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis Pemerintah Daerah. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Akuntabilitas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran, program dan kegiatan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui Perencanaan Kinerja (Performance Plan). Selanjutnya pada akhir tahun 2023 target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya, sehingga diketahui Celah Kinerja (Performance Gap). Selisih yang timbul akan dianalisis guna menetapkan strategi untuk Peningkatan Kinerja Di Masa Mendatang (Performance Improvement).

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/ punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Kerangka pengukuran kinerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Permenpan RB No. 12 tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Permenpan RB

Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \left(\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \right) \times 100\%$$

3. Capaian Indikator Kinerja Utama, penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran skala ordinal untuk kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk outcome.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2023 dan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2023 s.d 2026 terdapat 2 (dua) tujuan dan 3 (tiga) sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, seperti yang tertera dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Pati Tahun 2023-2026

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1 (2023)	Tahun 2 (2024)	Tahun 3 (2025)	Tahun 4 (2026)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	Tujuan	Indikator Tujuan :					
	Meningkatnya Produksi Perikanan	Pertumbuhan produksi perikanan (%)	0,5	0,575	0,63	0,69	0,69
	Meningkatnya Konsumsi Makan Ikan	Pertumbuhan Angka Konsumsi Ikan (AKI) (%)	1,8	1,8	1,9	1,9	1,9
II	Sasaran	Indikator Sasaran :					
	Meningkatnya Produksi Perikanan tangkap	Pertumbuhan produksi perikanan tangkap (%)	0,5	0,58	0,65	0,7	0,7
	Meningkatnya Produksi Perikanan budidaya	Pertumbuhan produksi perikanan budidaya (%)	0,5	0,57	0,61	0,68	0,68
	Meningkatnya Produksi hasil olahan ikan	Pertumbuhan produksi hasil olahan ikan (%)	2,19	2,35	2,37	2,52	2,52

Pengukuran kinerja diperlukan sebagai dasar untuk mengetahui capaian kinerja dan menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan suatu program atau kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.

Adapun pencapaian tujuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati hingga tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tujuan 1 :

Meningkatnya Produksi Perikanan

Keberhasilan tujuan ini diukur melalui indikator pertumbuhan produksi perikanan. Untuk capaian kinerja tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2.
Capaian Indikator Kinerja Tujuan 1 Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Pati Tahun 2023

Pertumbuhan Produksi Perikanan	
Target tahun 2023	0,5%
Realisasi tahun 2023	5,67%
Capaian	1.134%

Dari Tabel 3.2 diatas dapat disimpulkan bahwa target pertumbuhan produksi perikanan sebesar 0,5% sudah tercapai sebesar 5,67% yang artinya capaian indikator kinerja melebihi 100% yaitu sebesar 1.134%.

Produksi perikanan terdiri dari perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Produksi perikanan tangkap berasal dari hasil tangkapan laut dan hasil tangkapan di perairan umum, sedangkan untuk perikanan budidaya terdiri atas budidaya tambak, budidaya kolam. Formula yang digunakan untuk perhitungan pertumbuhan produksi perikanan adalah jumlah produksi perikanan tangkap dan budidaya tahun 2023 dikurangi dengan jumlah produksi perikanan tangkap dan budidaya tahun 2022 hasilnya dibagi dengan jumlah produksi perikanan tangkap dan budidaya tahun 2022 kemudian dikali 100%.

Produksi perikanan baik itu perikanan tangkap maupun budidaya sangat dipengaruhi oleh iklim. Untuk tahun 2023 realisasi mencapai 1.134 dikarenakan adanya pertumbuhan produksi perikanan tangkap yang tinggi walaupun ada penurunan produksi dari perikanan budidaya tetapi penurunannya tidak signifikan.

Tujuan 2 :
Meningkatnya Konsumsi Makan Ikan

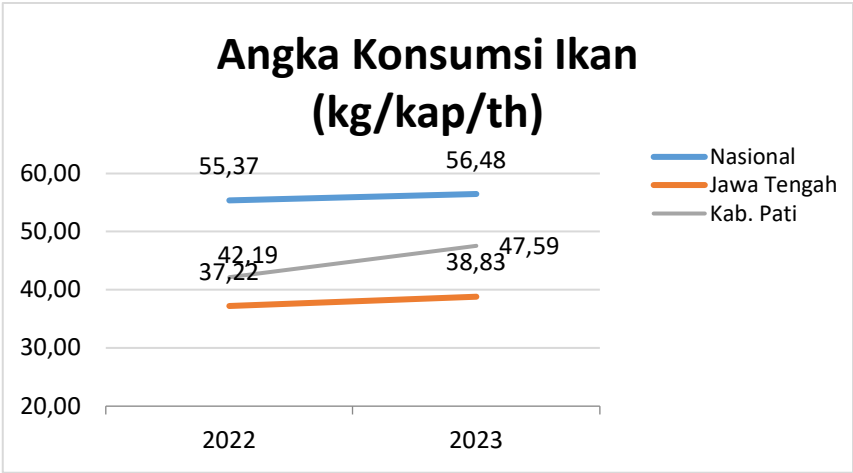
Keberhasilan tujuan ini diukur melalui indikator pertumbuhan angka konsumsi ikan. Untuk capaian kinerja tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.3.
Capaian Indikator Kinerja Tujuan 2 Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Pati Tahun 2023

Pertumbuhan Angka Konsumsi Ikan (AKI)	
Target tahun 2023	1,8%
Realisasi tahun 2023	12,80%
Capaian	711,11%

Dari Tabel 3.3 diatas dapat disimpulkan bahwa target pertumbuhan Angka Konsumsi Ikan sebesar 1,8% sudah tercapai sebesar 12,80% yang artinya capaian indikator kinerja melebihi 100% yaitu sebesar 711,11%. Formula yang digunakan untuk perhitungan pertumbuhan Angka Konsumsi Ikan adalah mengurangkan Angka Konsumsi Ikan tahun ini dengan Angka Konsumsi Ikan tahun lalu kemudian jumlah pengurangan dibandingkan dengan tahun lalu dikali 100%. Perlu diketahui untuk Angka Konsumsi Ikan Kabupaten Pati merupakan Kabupaten dengan Angka Konsumsi Ikan tertinggi di Jawa Tengah.

Angka Konsumsi Ikan Kabupaten Pati adalah Jumlah kilogram ikan yang dikonsumsi masyarakat Kabupaten selama satu tahun dalam bentuk konversi setara konsumsi ikan utuh segar. Rumus perhitungan untuk angka konsumsi ikan adalah $A+B+C$ dimana A adalah Konsumsi di rumah tangga, B adalah konsumsi luar rumah tangga, dan C adalah konsumsi tidak tercatat. Data A dan B berasal dari data BPS sedang data C berasal dari pendataan kabupaten.



Untuk data konsumsi ikan yang disajikan memakai data tahun n-1 karena data konsumsi ikan baru akan dirilis oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di semester kedua tahun berjalan. Dalam diagram garis diatas dapat dilihat untuk Angka Konsumsi ikan di Kabupaten pati nilainya diatas pencapaian Angka Konsumsi Ikan tingkat Provinsi Jawa Tengah dan di bawah pencapaian tingkat Nasional.

Keberhasilan dari tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati “Meningkatnya Produksi Perikanan” dan “Meningkatnya Konsumsi Makan Ikan” didukung oleh tiga sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya produksi perikanan tangkap dengan tolak ukur keberhasilan berupa peningkatan produksi tangkapan ikan di laut dan produksi tangkapan ikan di perairan umum.
2. Meningkatnya produksi perikanan budidaya dengan tolak ukur keberhasilan berupa peningkatan produksi budidaya ikan air payau (tambak) dan produksi budidaya ikan air tawar (kolam).
3. Meningkatnya produksi hasil olahan ikan dengan tolak ukur keberhasilan berupa peningkatan produksi olahan ikan dan ragam jenis diversifikasi olahan ikan.

*Sasaran Strategis 1 :
Meningkatnya produksi perikanan tangkap*

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator kinerja pertumbuhan produksi perikanan tangkap. Formula yang digunakan untuk perhitungan pertumbuhan produksi perikanan tangkap adalah jumlah produksi perikanan tangkap laut dan tangkap perairan umum tahun 2023 dikurangi dengan jumlah produksi perikanan tangkap laut dan tangkap perairan umum tahun 2022 hasilnya dibagi dengan jumlah produksi perikanan tangkap laut dan tangkap perairan umum tahun 2022 kemudian dikali 100%. Untuk capaian kinerja tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.4.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Pati Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Pertumbuhan Produksi perikanan tangkap	%	0,5	10,01	2.002%

Sasaran Strategis 2 :
Meningkatnya produksi perikanan budidaya

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator kinerja pertumbuhan produksi perikanan budidaya. Formula yang digunakan untuk perhitungan pertumbuhan produksi perikanan budidaya adalah jumlah produksi budidaya perikanan air payau dan budidaya perikanan air tawar tahun 2023 dikurangi dengan jumlah produksi budidaya perikanan air payau dan budidaya perikanan air tawar tahun 2022 hasilnya dibagi dengan jumlah produksi budidaya perikanan air payau dan budidaya perikanan air tawar tahun 2022 kemudian dikali 100%. Untuk capaian kinerja tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.5.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Pati Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Pertumbuhan Produksi perikanan budidaya	%	0,5	-1,05	-210%

Sasaran Strategis 3 :
Meningkatnya produksi hasil olahan ikan

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator kinerja pertumbuhan produksi hasil olahan ikan. Formula yang digunakan untuk perhitungan pertumbuhan produksi hasil olahan ikan adalah jumlah produksi hasil olahan ikan 2023 dikurangi dengan jumlah produksi hasil olahan ikan tahun 2022 hasilnya dibagi dengan jumlah produksi hasil olahan ikan tahun 2022 kemudian dikali 100. Untuk capaian kinerja tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.6.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya produksi hasil olahan ikan	Pertumbuhan Produksi hasil olahan ikan	%	2,19	68,94	3.148%

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang dijumpai didalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan di masa yang akan datang.

Tahun 2023 merupakan tahun pertama dari periode Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026. Sehingga perbandingan capaian kinerja tahun ini akan dihitung berdasarkan data series dari tahun 2020 sampai tahun 2023. Perbandingan ini dilakukan untuk mengetahui trend capaian kinerja setiap indikator sasaran yang telah di capai. Pengukuran Capaian Kinerja pada masing – masing indikator kinerja sasaran merupakan kontrol untuk mengetahui efektivitas upaya

pembangunan yang telah dilakukan selama periode perencanaan. Adapun perbandingan data series selama tiga tahun sebagai berikut:

Tabel 3.7.
Data Series Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2020 s.d 2023

No.	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023
1.	produksi perikanan (ton)	141.303,00	124.833,00	117.091,92	123.730,54
2.	Produksi perikanan tangkap (ton)	94.727,00	78.183,00	71.120,29	78.240,28
3.	Produksi perikanan budidaya (ton)	46.576,00	46.650,00	45.971,63	45.490,26
4.	Angka Konsumsi Ikan (AKI) (kg/kap/tahun)	42.94	44.69	42.19	47.59
5.	Produksi hasil olahan ikan (ton)	17.736.698	19.381.463	25.479.567	43.046.400

Dari tabel data series di atas dapat dihitung pertumbuhan dari masing-masing indikator kinerja sehingga dapat terlihat capaian kinerjanya. Hasil perhitungan dari masing-masing indikator dapat dilihat dalam tabel 3.7 berikut ini :

Tabel 3.8.
Perbandingan Hasil Realisasi Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2021, 2022, dan Tahun 2023

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi		2023		
			2021	2022	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan	Pertumbuhan produksi perikanan (%)	-11,66	-6,20	0,5	5,67	1.134
2.	Meningkatnya Produksi Perikanan tangkap	Pertumbuhan produksi perikanan tangkap (%)	-17,46	-9,03	1,8	10,01	2.002
3.	Meningkatnya Produksi Perikanan budidaya	Pertumbuhan produksi perikanan budidaya (%)	0,16	-1,45	0,5	-1,05	-210
4.	Meningkatnya Konsumsi Makan Ikan	Pertumbuhan Angka Konsumsi Ikan (%)	4,08	-5,59	0,5	12,80	711,11
5.	Meningkatnya Produksi hasil olahan ikan	Pertumbuhan produksi hasil olahan ikan (%)	9,27	31,46	2,19	68,94	3.148
Capaian rata-rata 2023			-	-	-	-	1.357

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati telah melaksanakan beberapa kegiatan strategis. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja tahun 2023 untuk mencapai 2 (dua) tujuan dan 3 (tiga) sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pati dengan 5 (lima) indikator kinerja

utama perangkat daerah. Hasil Pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja 5 (lima) indikator kinerja utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati tahun 2023 adalah sebesar 1.357%. Dari kelima indikator yang telah disebutkan pada tabel diatas 4 (empat) indikator sudah mencapai target sedangkan 1 (satu) indikator belum memenuhi target.

Berikut akan dibandingkan capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran dari Dinas Kelautan dan Perikanan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.



Dari grafik capaian kinerja diatas dapat dilihat jika produksi perikanan mengalami pertumbuhan negatif di tahun 2021 dan 2022 dan pertumbuhan positif di tahun 2023. Produksi perikanan terdiri dari perikanan tangkap dan budidaya sehingga pertumbuhan produksi perikanan mengikuti pertumbuhan perikanan tangkap dan budidaya.

Produksi perikanan tangkap laju pertumbuhan sama dengan pertumbuhan produksi perikanan dimana tahun 2021 dan 2022 mengalami pertumbuhan negatif dan di tahun 2023 mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan produksi perikanan di tahun 2023 mengalami kenaikan yang signifikan dikarenakan kedatangan ikan yang berasal wilayah bagian timur dan sisa produksi yang belum terjual di tahun sebelumnya karena harga ikan di tahun 2022 yang rendah makanya ikan baru dikeluarkan di tahun 2023 sehingga volume produksi di tahun 2023 meningkat.

Pertumbuhan produksi budidaya pertumbuhannya relatif lambat. Jumlah produksi dari tahun 2020 ke tahun 2023 relatif

menurun walaupun penurunannya tidak signifikan. Penurunan produksi di tahun 2022 dan 2023 dikarenakan oleh pengaruh dampak elnino sehingga menyebabkan kemarau panjang dan berakibat lahan budidaya mengalami kekeringan selain itu penurunan produksi disebabkan pula oleh sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi dikarenakan Dinas Kelautan dan Perikanan tidak mendapatkan kuota pupuk subsidi.

Pertumbuhan angka konsumsi ikan didasarkan pada tingkat konsumsi ikan penduduk terhadap olahan ikan. Pertumbuhan angka konsumsi ikan paling tinggi di tahun 2023 dan pertumbuhan angka konsumsi ikan terendah di tahun 2022. Dampak pandemi covid-19 salah satunya adalah menurunnya daya beli masyarakat termasuk didalamnya daya beli terhadap produk hasil perikanan sehingga di tahun 2022 angka konsumsi ikan mengalami pertumbuhan negatif.

Pertumbuhan produksi hasil olahan ikan dibanding dengan realisasi indikator lainnya merupakan yang tertinggi. Kenaikan produksi hasil olahan ini tidak lepas dari bertumbuhnya unit-unit pengolahan ikan dan makin beragamnya diversifikasi olahan pangan. Dahulu yang diproses untuk dijadikan produk olahan ikan hanya daging ikannya saja. Semakin majunya perkembangan zaman produk ikan yang diproses tidak hanya dagingnya saja melainkan hampir semua bagian ikan meliputi kepala, ekor, duri maupun kulit dan sisik dapat diproses untuk dijadikan produk olahan ikan yang bisa berupa abon duri, krupuk, kue kering maupun produk olahan ikan lainnya.

Terdapat 19 sub kegiatan dan 9 kegiatan urusan kelautan dan perikanan yang tercakup dalam 4 Program yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pati.

Program dan kegiatan Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan untuk tahun 2023 secara umum sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
 - 1) Pengelolaan penangkapan ikan di Wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
 - a. Penyediaan data dan informasi sumberdaya ikan;
 - b. Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap;
 - c. Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap.
 - 2) Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah Kabupaten/Kota;
 - a. Pengembangan kapasitas nelayan kecil;
 - b. Pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha.
 - 3) Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
 - a. Pelayanan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI).
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
 - 1) Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil;
 - a. Pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil;
 - b. Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
 - 2) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan;
 - a. Penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
 - b. Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
 - c. Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
 - d. Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
 - e. Pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat;

- f. Perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di darat;
 - g. Perencanaan, dan pengembangan pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan di darat;
- 3. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - 1) Pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota.
 - a. Pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota.
- 4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - 1) Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil;
 - a. Penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.
 - 2) Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil;
 - a. Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil.
 - 3) Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.

3.3. Hambatan dan Rencana Aksi

Dalam pencapaiannya ada beberapa tantangan dan hambatan yang harus dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam memenuhi target indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Tantangan dan hambatan dalam pengukuran kinerja ini diantaranya:

1. Faktor alam yang tidak dapat diprediksi, diantaranya: ketidakpastian cuaca, gelombang tinggi, kenaikan suhu permukaan laut (sea surface temperature-SST) dan perubahan arah angin;
2. Belum optimalnya sarana dan prasarana produksi perikanan, pemasaran hasil produk olahan perikanan, penangkapan ikan, dan produksi garam;
3. Penurunan kualitas lingkungan budidaya, wilayah pesisir, dan wilayah penangkapan ikan;
4. Maraknya alih fungsi lahan potensial budidaya ikan dan tambak garam untuk kegiatan non sektor perikanan;
5. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia pelaku usaha sektor perikanan;
6. Belum optimalnya penerapan metode CBIB, CPIB, dan higienitas serta sanitasi dalam pengolahan produk olahan hasil perikanan;
7. Kuota pupuk bersubsidi hanya terbatas untuk lahan pertanian saja belum merambah ke lahan perikanan;
8. Perekonomian yang terpuruk di masa pandemi menyebabkan daya beli masyarakat terhadap ikan juga menurun;
9. Intervensi pemerintah yang tidak memihak pelaku usaha kelautan dan perikanan;
10. Keberagaman produk substitusi yang harganya lebih ekonomis dibanding dengan produk olahan ikan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa solusi yang akan dijadikan Rencana Aksi yang akan dilakukan dalam rangka memenuhi tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati antara lain :

- 1) Meningkatkan keberdayaan nelayan dengan peningkatan ketrampilan, keikutsertaan dalam asuransi nelayan, sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi penangkapan ikan;
- 2) Meningkatkan daya dukung ekosistem sumberdaya perairan dan sumberdaya ikan dan diikuti dengan pengendalian

- pemanfaatan sumberdaya perikanan dengan melibatkan partisipasi masyarakat;
- 3) Memfasilitasi nelayan dalam audiensi dengan pemerintah daerah, provinsi maupun pusat;
 - 4) Penerapan teknologi dan standarisasi sistem budidaya perikanan serta diversifikasi komoditas;
 - 5) Keikutsertaan dalam asuransi pembudidaya;
 - 6) Standarisasi sistem perbenihan untuk memenuhi kebutuhan benih ikan;
 - 7) Pengelolaan lingkungan budidaya serta pengendalian hama dan penyakit ikan;
 - 8) Penyediaan prasarana dan sarana yang memadahi untuk budidaya perikanan;
 - 9) Peningkatan mutu hasil olahan ikan melalui pembinaan mutu (termasuk penjaminan higienitas serta sanitasi);
 - 10) Meningkatkan diversifikasi olahan hasil perikanan;
 - 11) Ikut mendukung Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) melalui sosialisasi gerakan makan ikan dengan menggandeng para pengolah ikan dan kader-kader PKK tingkat Kabupaten sampai Desa.

3.4. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan termasuk aspek akuntabilitas manajerial dengan fokus pada efisiensi pengalokasian dana pada kegiatan. Dana kegiatan ini merupakan indikator input (masukan) dari 19 sub kegiatan dan 9 kegiatan urusan kelautan dan perikanan yang tercakup dalam 4 Program Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dengan anggaran sebesar Rp. 5.193.561.000,00 (lima milyar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 5.135.660.220,00 (lima milyar seratus tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) atau sebesar 98,89%. Dengan capaian realisasi tersebut menunjukkan bahwa semua kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 dapat terlaksana dengan sangat baik.

Adapun realisasi anggaran yang terinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Realisasi APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	%
3.25 . 03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.492.371.500	2.454.323.495	98,47%
3.25 . 03 . 2.01	<i>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	106.200.000	101.996.500	96,04%
3.25 . 03 . 2.01 . 02	Penyediaan data dan informasi sumberdaya ikan	4.000.000	4.000.000	100,00%
3.25 . 03 . 2.01 . 02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	15.000.000	14.900.000	99,33%
3.25 . 03 . 2.01 . 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	87.200.000	83.096.500	95,29%
3.25 . 03 . 2.02	<i>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	2.038.492.500	2.026.909.200	99,43%
3.25 . 03 . 2.02 . 01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	267.040.100	265.965.100	99,60%
3.25 . 03 . 2.02 . 03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	1.771.452.400	1.760.944.100	99,41%
3.25 . 03 . 2.03	<i>Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</i>	347.679.000	325.417.795	93,60%
3.25 . 03 . 2.03 . 02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	347.679.000	325.417.795	93,60%
3.25 . 04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.618.149.500	2.598.296.725	99,24%
3.25 . 04 . 2.02	<i>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</i>	8.000.000	7.975.000	99,69%
3.25 . 04 . 2.02 . 01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	4.000.000	3.975.000	99,38%
3.25 . 04 . 2.02 . 04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	4.000.000	4.000.000	100,00%
3.25 . 04 . 2.04	<i>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</i>	2.610.149.500	2.590.321.725	99,24%
3.25 . 04 . 2.04 . 01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.000.000	4.000.000	100,00%
3.25 . 04 . 2.04 . 02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.530.800.000	1.523.384.650	99,52%
3.25 . 04 . 2.04 . 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	270.000.000	268.135.000	99,31%
3.25 . 04 . 2.04 . 04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	8.630.500	8.630.500	100,00%
3.25 . 04 . 2.04 . 05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	581.719.000	572.360.575	98,39%
3.25 . 04 . 2.04 . 06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	55.000.000	55.000.000	100,00%
3.25 . 04 . 2.04 . 07	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	160.000.000	158.811.000	99,26%
3.25 . 05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	59.040.000	59.040.000	100,00%
3.25 . 05 . 2.01	<i>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air</i>	59.040.000	59.040.000	100,00%
3.25 . 05 . 2.01 . 01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	59.040.000	59.040.000	100,00%
3.25 . 06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	24.000.000	24.000.000	100,00%
3.25 . 06 . 2.01	<i>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</i>	4.000.000	4.000.000	100,00%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	%
3.25 . 06 . 2.01 . 01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.000.000	4.000.000	100,00%
3.25 . 06 . 2.02	<i>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</i>	15.000.000	15.000.000	100,00%
3.25 . 06 . 2.02 . 01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	15.000.000	15.000.000	100,00%
3.25 . 06 . 2.03	<i>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	5.000.000	5.000.000	100,00%
3.25 . 06 . 2.03 . 02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000	5.000.000	100,00%

BAB IV
P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2023 merupakan hasil penilaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan sub kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Secara global hasil pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2023 ditinjau dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan hasil analisis capaian kinerja, maka pada Tahun 2023 ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati menunjukkan capaian kualitatif sebesar 1.357%. Hasil ini sudah melebihi target sasaran Tahun 2023 yang telah ditetapkan pada Renstra.

Sedangkan rincian capaian kinerja tujuan/ sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Persentase (%)
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan	Pertumbuhan produksi perikanan (%)	0,5	5,67	1.134
2.	Meningkatnya Produksi Perikanan tangkap	Pertumbuhan produksi perikanan tangkap (%)	1,8	10,01	2.002
3.	Meningkatnya Produksi Perikanan budidaya	Pertumbuhan produksi perikanan budidaya (%)	0,5	-1,05	-210
4.	Meningkatnya Konsumsi Makan Ikan	Pertumbuhan Angka Konsumsi Ikan (%)	0,5	12,80	711,11
5.	Meningkatnya Produksi hasil olahan ikan	Pertumbuhan produksi hasil olahan ikan (%)	2,19	68,94	3.148

B. S A R A N

1. Untuk mencapai tingkat keberhasilan pembangunan yang semaksimal mungkin maka ke depan perlu adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan satu dengan yang lain. Pelaksanaan kegiatan perlu dilandasi integritas dan dedikasi yang tinggi dari aparat yang menangani sektor perikanan dan kelautan.

2. Keberhasilan pembangunan perikanan dan kelautan tergantung pada partisipasi seluruh bidang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, maka faktor kerja sama dan koordinasi diperlukan sedini mungkin yaitu sejak tahap perencanaan yang terus dikembangkan secara serasi pada tahap pelaksanaan serta pengawasan.
3. Keberhasilan pembangunan perikanan dan kelautan juga tergantung dari sistem pelaksanaan pembangunan yang *bottom up* dengan senantiasa mempertimbangkan aspirasi dari bawah utamanya petani tambak, petani kolam, pembenih, petambak garam, bakul dan pengolah ikan dan nelayan sebagai objek pembangunan perikanan dan kelautan.

LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : TEGUH WIDYATMOKO, AP, M.Si

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HENGGAR BUDI ANGGORO, ST.,MT

Jabatan : Pj Bupati Pati

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pati, 02 November 2023

Pihak Kedua,
Pj Bupati Pati



HENGGAR BUDI ANGGORO, ST., MT

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Pati



TEGUH WIDYATMOKO, AP, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PATI

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Pertumbuhan produksi perikanan tangkap	0,5%
2.	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Pertumbuhan produksi perikanan budidaya	0,5%
3.	Meningkatnya produksi hasil olahan ikan	Pertumbuhan produksi hasil olahan ikan	2,19%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 2.492.371.500,00	APBD P
2 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 2.618.149.500,00	APBD P
3 Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	Rp. 59.040.000,00	APBD P
4 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 24.000.000,00	APBD P

Pati, 02 November 2023

Pj Bupati Pati



HENGGAR BUDI ANGGORO, ST., MT

Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan



Kabupaten Pati

TEGUH WIDYATMOKO, AP, M.Si